



RANCANGAN RENCANA KERJA 2024

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
JL. IMAM BONJOL NO. 31 TAREMPA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 Ayat 3, bahwa Renja PD dibuat sesuai dengan pokok dan fungsi serta mengacu pada RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Kelanjutan dengan telah tersusunnya Rancangan Renja PD ini, dapat dilihat sejauh mana Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan. Untuk itu dibutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Tarempa, 17 Maret 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

JHON AQUARIUS PUTRA, SE.M.Si

NIP. 19730122 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LAU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	26
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV. PENUTUP	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta mempertimbangkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.

Konsepsi Perencanaan Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat kerangka Program/Kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, meletakkan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai acuan dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat DPRD dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53).
22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomo 477);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun tujuan kongkritnya adalah :

1. Mengetahui hasil dan manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan.
2. Agar seluruh program yang disusun terfokus dan tepat sasaran.
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan dari Sekretariat DPRD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V. PENUTUP

Bab IV menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 37.190.850.702,- dengan realisasi mencapai 88,15% dari keseluruhan anggaran dengan rincian kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

**Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya
12	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan

4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
13	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
19	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
27	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
28	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
8.	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
29	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
30	Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
9.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
31	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
32	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
10.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
33	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
34	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
35	Sub Kegiatan Pembahasan APBD
36	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
11.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

37	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
38	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
39	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
40	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
12.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
41	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
42	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
43	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
13.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
44	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Ketercapaian (%) (R/T)
Peningkatan Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Persentase Administrasi dan Pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	100	100	100

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 37.190.850.702 dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 32.782.052.507.

Evaluasi berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2022 pada Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 6 (Enam) Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau tidak dapat dilaksanakan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Lebih Lanjut Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2022 sebesar Rp.13.934.118.720,- dapat terealisasi sebesar Rp.13.686.931.957,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 61,22% dan output dari rencana tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia Tahun 2022 sebesar Rp. 308.258.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 259.932.791,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 84,32 % dan output dari rencana tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.385.109.210,- terealisasi sebesar Rp.1.234.792.001,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 83,74% dan output dari rencana tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.561.474.312,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.343.833.205,- atau persentase sebesar 85,47% dan output dari rencana tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2022 sebesar Rp. 563.525.700,- dapat terealisasi sebesar Rp.387.513.000,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target

- Keuangan sebesar 53,33% dan output dari rencana tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
6. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan Anggaran yang tersedia pada Tahun 2022 sebesar Rp.929.753.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.665.346.195,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 80,29% dan output dari rencana tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 7. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp. 358.296.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 271.638.500,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 44,12% dan output dari rencana tersedianya Layanan Administrasi DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- c. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran Tahun 2022 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.284.059.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.503.842.791,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 81,79% dan output dari rencana tersedianya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan anggaran Tahun 2022 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 792.020.100,- dapat terealisasi sebesar Rp.567.025.368,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 81,09% dan output dari rencana tersedianya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan anggaran Tahun 2022 untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.653.067.960,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.748.054.256,- atau persentase Pencapaian Target

Keuangan sebesar 70,58% dan output dari rencana tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

- f. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan anggaran Tahun 2022 untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.953.832.600,- dengan realisasi sebesar Rp.2.492.832.794,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 77,71% dan output dari rencana tersedianya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan anggaran Tahun 2022 untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.381.428.400,- dengan realisasi sebesar Rp.4.554.663.543,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 84,64% dan output dari rencana tersedianya Fasilitasi Tugas DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Mempunyai tugas pokok “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”. Untuk Menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Mempunyai Fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
2. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Desa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
4. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Perubahan Peraturan Perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala Daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2016-2021, yaitu :

“Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022”.

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain:

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- e. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam aktivitas kinerja DPRD baik individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 menitikberatkan pada analisa kebutuhan tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2024. Hal ini dikarenakan kegiatan dimaksud sudah dilaksanakan pada Tahun 2023. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 ini dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKAS I	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	KKA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOT A	100 Persen	21,444,152,793	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN / KOTA	KKA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N KABUPATEN /K OTS	100 Persen	21,444,152,793	
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	101,819,200	PERENCANAA N. PENGANGGAR AN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	101,819,200	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	83,416,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	83,416,800	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,800	

3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,919,700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,919,700	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,949,900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,949,900	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,513,600	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KKA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,513,600	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2,953,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2,953,500	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,064,900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,064,900	
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,981,451,969	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,981,451,969	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	3,708,535,869	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/Bulan	3,708,535,869	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	270,320,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	KKA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 Dokumen	270,320,000	

10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,596,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,596,100		
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	238,232,000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	238,232,000		
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	4 Paket	146,564,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	4 Paket	146,564,000		
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	91,668,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang	91,668,000		
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,348,537,788	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KKA	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1,348,537,788		
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKA	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	84,689,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKA	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	84,689,300		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	456,645,108	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	KKA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	456,645,108		

		Kantor yang disediakan		Kantor		Kantor yang disediakan		
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	12 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65,998,000	12 Paket	KKA	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	3 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	203,515,600	3 Paket	KKA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KKA	4 Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	139,232,500	4 Paket	KKA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	KKA	1 Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	50,000,000	1 Dokumen	KKA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	1 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,010,000	1 Laporan	KKA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248,447,280	1 Laporan	KKA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KKA	100 Persen	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35,123,000	100 Persen	KKA	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	35,123,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	35,123,000	
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	2,674,672,017	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	2,674,672,017	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	179,630,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	179,630,400	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	244,916,625	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	244,916,625	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2,250,124,992	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2,250,124,992	
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	428,413,299	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	428,413,299	

25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	84,225,030	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	84,225,030
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	60,507,200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	60,507,200
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	283,681,069	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	283,681,069
8	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	KKA	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	12,231,753,520	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	KKA	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	12,231,753,520
28	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KKA	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang	11,018,793,520	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KKA	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	20 Orang	11,018,793,520
29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4 Paket	542,367,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KKA	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4 Paket	542,367,000
30	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KKA	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	12 Bulan	670,593,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KKA	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	12 Bulan	670,593,000
9	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	KKA	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	404,150,000	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	KKA	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	404,150,000

31	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	152,009,700	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	152,009,700	
32	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KKA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	252,140,300	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KKA	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	252,140,300	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	KKA	Capaian Penetapan Perda	100 Persen	17,270,979,264	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	KKA	Capaian Penetapan Perda	100 Persen	17,270,979,264	
10	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	KKA	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	4,090,167,200	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	KKA	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	4,090,167,200	
33	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Perda	3,502,969,900	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	3,502,969,900	
34	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	587,197,300	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	4 Perda	587,197,300	
11	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	KKA	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	752,751,900	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	KKA	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 Persen	752,751,900	

35	Pembahasan KUA dan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	22,432,500	Pembahasan KUA dan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	22,432,500	
36	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	45,317,000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	45,317,000	
37	Pembahasan APBD	KKA	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	343,125,400	Pembahasan APBD	KKA	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	343,125,400	
38	Pembahasan APBD Perubahan	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	341,877,000	Pembahasan APBD Perubahan	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	341,877,000	
12	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	KKA	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	5,834,097,600	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	KKA	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	5,834,097,600	
39	Pendalaman Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1,116,040,000	Pendalaman Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1,116,040,000	
40	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	KKA	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Prodduk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	3,623,696,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	KKA	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Prodduk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	3,623,696,000	
41	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KKA	Jumlah tenaga Ahli	10 Orang	616,887,600	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KKA	Jumlah tenaga Ahli	10 Orang	616,887,600	
42	Penyusunan Program Kerja DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	477,474,000	Penyusunan Program Kerja DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	477,474,000	

13	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	KKA	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	3,000,422,564	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	KKA	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	3,000,422,564	
43	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	KKA	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	659,999,900	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	KKA	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	659,999,900	
44	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	470,680,000	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	470,680,000	
45	Pelaksanaan Reses	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1,869,742,664	Pelaksanaan Reses	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1,869,742,664	
14	FASILITASI TUGAS DPRD	KKA	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	3,593,540,000	FASILITASI TUGAS DPRD	KKA	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	3,593,540,000	
46	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	3,593,540,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KKA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	3,593,540,000	
JUMLAH					38,715,132,057						38,715,132,057

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipati, proses *bottom-up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga di harapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipasi. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas diman realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum DKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan

musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang di Koordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahsan renja adalah sinkroniasasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indicator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, Provinsi maupun Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD sebagai Penyedia Fasilitas DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga peranan DPRD menjadi sangat luas dan penting bagi pembangunan Daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

. Tujuan

Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah”** dan misi ke 3 (tiga) **Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi**, Sekretariat DPRD termasuk OPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

“Meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”

. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Ranwal ini adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Meningkatnya fasiltasi pengawasan anggaran; dan
3. Meningkatnya dukungan pelayanan sekretariat DPRD terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penyedia fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk mendukung semua kegiatan DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sehingga sangat dibutuhkan Profesionalisme dalam pelaksanaannya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
Meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Fasilitas pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitas Pencapaian Prolegda	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan yang disesuaikan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi DPRD sebagai penyerap Aspirasi masyarakat yang akan di tuangkan dalam Peraturan Daerah yang ditujukan demi kemakmuran masyarakat. Adapun Program dan Kegiatan yang dirancang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 terdiri dari:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- i. Layanan Administrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Peningkatan Kapasitas DPRD
- d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- e. Fasilitasi Tugas DPRD

Direncanakan pada Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan 2 (Dua) Program dan 13 (Tiga Belas) Kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebagaimana hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 38.715.132.057,-.

BAB IV
Renacana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Tahun 2023

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KKA	100 Persen	21,444,152, 793	APBD		100 Persen	22,476,820, 648
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	KKA	8 Dokumen	101,819,200	APBD		8 Dokumen	99,347,531

DAERAH	Kinerja Perangkat Daerah	KKA	2 Dokumen	83,416,800	APBD			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	2 Dokumen	83,416,800	APBD		2 Dokumen	63,966,480
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	KKA	1 Dokumen	4,000,800	APBD		1 Dokumen	8,186,850
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	1 Dokumen	3,919,700	APBD		1 Dokumen	6,408,967
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	KKA	1 Dokumen	2,949,900	APBD		1 Dokumen	5,764,110
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KKA	1 Dokumen	2,513,600	APBD		1 Dokumen	4,901,750
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	1 Dokumen	2,953,500	APBD		1 Dokumen	6,374,979
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	1 Dokumen	2,064,900	APBD		1 Dokumen	3,744,395

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKA	100 Persen	3,981,451,9 69	APBD	100 Persen	4,029,699,6 31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	24 Orang/Bulan	3,708,535,869	APBD	24 Orang/Bulan	3,708,535,869
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dokumen	270,320,000	APBD	1 Dokumen	308,644,875
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	2,596,100	APBD	1 Laporan	12,518,887
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKA	100 Persen	238,232,000	APBD	100 Persen	495,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	KKA	4 Paket	146,564,000	APBD	4 Paket	395,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	18 Orang	91,668,000	APBD	18 Orang	100,000,000

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKA	100 Persen	1,348,537,7 88	APBD	100 Persen	2,300,337,3 70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	KKA	12 Paket	84,689,300	APBD	12 Paket	74,999,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KKA	12 Paket	491,768,108	APBD	12 Paket	471,519,620
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	KKA	12 Paket	65,998,000	APBD	12 Paket	100,377,750
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	3 Paket	203,515,600	APBD	3 Paket	344,998,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	KKA	4 Paket	139,232,500	APBD	4 Paket	217,500,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	KKA	1 Dokumen	50,000,000	APBD	1 Dokumen	200,000,000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	1 Laporan	100,010,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	248,447,280	APBD		1 Laporan	690,943,000
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	100 Persen	2,674,672,017	APBD		100 Persen	2,674,672,017
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	179,630,400	APBD		1 Laporan	179,630,400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	KKA	1 Laporan	244,916,625	APBD		1 Laporan	244,916,625
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang disediakan	KKA	12 Laporan	2,250,124,992	APBD		12 Laporan	2,250,124,992
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Terlaksananya Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat	KKA	100 Persen	428,413,299	APBD		100 Persen	428,413,299

PEMERINTAH DAERAH	Daerah								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	12 Unit	84,225,030	APBD	12 Unit	84,225,030		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	KKA	60 Unit	60,507,200	APBD	60 Unit	60,507,200		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	KKA	2 Unit	283,681,069	APBD	2 Unit	283,681,069		
LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD		KKA	100 Persen	12,231,753,520	APBD	100 Persen	12,231,753,520		
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	KKA	20 Orang	11,018,793,520	APBD	20 Orang	11,018,793,520		
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang	KKA	4 Paket	542,367,000	APBD	4 Paket	542,367,000		

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	KKA	1 Dokumen	3,502,969,900	APBD	1 Dokumen	3,676,149,600
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	KKA	4 Perda	587,197,300	APBD	4 Perda	547,260,000
	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	erlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	KKA	100 Persen	752,751,900	APBD	100 Persen	863,947,700
	Pembahasan dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	KKA	1 Dokumen	22,432,500	APBD	1 Dokumen	22,477,000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KKA	1 Dokumen	45,317,000	APBD	1 Dokumen	51,314,000
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan APBD	KKA	1 Dokumen	343,125,400	APBD	1 Dokumen	373,563,600
	Pembahasan Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	KKA	1 Dokumen	341,877,000	APBD	1 Dokumen	416,593,100

PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	KKA	100 Persen	5,834,097,600	APBD	100 Persen	5,833,210,000
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	KKA	1 Dokumen	1,116,040,000	APBD	1 Dokumen	1,116,040,000
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Prodduk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	KKA	1 Dokumen	3,623,696,000	APBD	1 Dokumen	3,623,696,000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga Ahli	KKA	10 Orang	616,887,600	APBD	10 Orang	616,000,000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	KKA	1 Dokumen	477,474,000	APBD	1 Dokumen	477,474,000
PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	KKA	100 Persen	3,000,422,564	APBD	100 Persen	3,000,422,564
Kunjungan Dalam Daerah Kerja	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	KKA	1 Laporan	659,999,900	APBD	1 Laporan	659,999,900
Penyusunan Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	KKA	1 Dokumen	470,680,000	APBD	1 Dokumen	470,680,000
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	KKA	1 Dokumen	1,869,742,664	APBD	1 Dokumen	1,869,742,664

Tabel 4.1
Kerangka Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
									38.715.132.0				39.799.547.2
4									57,00				40,00
									38.715.132.0				39.799.547.2
4									57,00				40,00
4 0									38.715.132.0				39.799.547.2
2									57,00				40,00
4 0 0									21.444.152.7				22.285.017.3
2 1									93,00				78,00
4 0 0 2									101.819.200,00				99.347.531,00
2 1 01													0
4 0 0 2 01													
1													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang disusun secara sistematis, analitis dan koordinatif sehingga menghasilkan strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dimasa yang akan datang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Artinya Perencanaan Strategis akan membantu Organisasi ini untuk menentukan bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar atau dibutuhkan (*Doing the right thing*) organisasi ini di masa yang akan datang.

Dengan Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meningkatkan eksistensi dan kapasitasnya dalam menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan perkembangan lingkungan dan masyarakat di daerah, terutama dalam memberikan dukungan yang maksimal guna pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah. Hingga sejatinya dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan berdasarkan Motto Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu **“Kayuh Serentak Langkah Sepijak”**.

Tarempa, 17 Maret 2023
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

JHON AQUARIUS PUTRA, SE. M.Si

NIP. 19730122 200312 1 007